

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS OPD KOTA PALEMBANG)

Dwi Agustina¹⁾, Periansya²⁾ dan Yevi Dwitayanti³⁾

^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: dwiagstna@gmail.com¹⁾, periansya@polsri.ac.id²⁾, yevi_dwitayanti@polsri.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi pemerintahan dan peran APIP terhadap penerapan good governance (PGG) dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah 32 OPD (menggunakan teknik purposive sampling). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan responden terdiri dari kepala kantor di OPD Kota Palembang, kepala sub bagian keuangan, staff keuangan, kepala sub bagian perencanaan dan program. Data dianalisis dengan teknik regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 29. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel sistem akuntansi pemerintahan dan peran APIP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* (PGG). Secara simultan sistem akuntansi pemerintahan dan peran APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* (PGG). Penelitian ini disimpulkan bahwasanya sistem akuntansi pemerintahan dan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sangat berpengaruh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di OPD Kota Palembang. Sistem akuntansi yang efektif membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dengan baik. APIP juga berperan penting dalam melakukan pengawasan internal, mendukung penerapan prinsip-prinsip penerapan *good governance*. Secara keseluruhan, keduanya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan Pemerintahan Kota Palembang.

Kata kunci: SAP, Peran APIP, PGG

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of government accounting systems and the role of APIP on the implementation of good governance (PGG) with quantitative methods. The population in this study was the Regional Apparatus Organization (OPD) which amounted to 32 OPD (using purposive sampling technique). The data collection technique used a questionnaire with respondents consisting of the head of the office at the Palembang City OPD, the head of the finance subdivision, the finance staff, the head of the planning and program subdivision. Data were analyzed using multiple linear regression techniques using SPSS version 29. Based on the results of the study, it is known that the variables of government accounting systems and the role of APIP partially have a positive and significant effect on the implementation of good governance (PGG). Simultaneously, the government accounting system and the role of APIP have a positive and significant effect on the implementation of good governance (PGG). This study concluded that the government accounting system and the role of APIP (Government Internal Supervisory Apparatus) are very influential in the implementation of good governance in the Palembang City OPD. An effective accounting system helps local governments perform their functions well. APIP also plays an important role in conducting internal supervision, supporting the implementation of the principles of good governance implementation. Overall, both have a significant positive impact on the management of Palembang City Government.

Keywords: SAP, Role of APIP, PGG

1. PENDAHULUAN

Pada pertumbuhan otonomi daerah mengubah hubungan perekonomian pusat dan daerah dengan cepat dan signifikan, otonomi daerah memberikan daerah kekuasaan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. UU No. 32 Tahun 2004 menandai dimulainya masa

transisi sistem pemerintahan daerah, yang telah membawa sejumlah perubahan signifikan. daerah yang ada sebelum UU No. 32 tahun 2004 diubah menjadi daerah dengan tingkat otonomi yang benar, dan bertanggung jawab.

Karena adanya otonomi daerah yang menjadikan perilaku pemerintahan lebih efisien

dan professional, maka pemerintah daerah harus melakukan transformasi birokrasi yang selama ini diterapkan. Dalam rangka memenuhi ambisi masyarakat dan mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, tata kelola pemerintahan yang efektif harus diperkuat di semua bidang tanpa terkecuali. Sehingga pemerintah dapat bertanggung jawab dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diperlukan penerapan pertanggungjawaban yang jelas dan nyata (Dewi & Suci, 2023).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menjelaskan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat terpenting dalam pembangunan nasional. Kualitas *good governance* berpengaruh terhadap terselenggaranya program pembangunan nasional. Semakin baik *good governance* dilaksanakan secara bertanggung jawab maka kualitas pelaporan keuangan pemerintah akan semakin baik. Dalam implementasi pemerintah yang baik berarti pemerintahan yang didasarkan nilai-nilai akuntabilitas, partisipasi, transparansi, daya tanggap, konsensus, keadilan, efisiensi, efektivitas, dan visi strategis.

Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan Kota Palembang pada tahun 2018-2021 berada pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Sedangkan pada pemerintahan Kota Palembang tahun 2022 terjadi penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Dalam hal mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik, pendapat BPK perlu terus tumbuh daripada menurun. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaporkan bahwa pemeriksaan menunjukkan adanya temuan-temuan BPK atas laporan keuangan pemerintahan kota Palembang Tahun 2022 seperti sistem dan langkah-langkah pengaturan keuangan daerah serta peraturan akuntansi pemerintah kota Palembang belum sepenuhnya memadai, belanja modal pada 28 OPD tidak tepat, Kekurangan volume atas pekerjaan pada delapan OPD, kekurangan Kas di Bendahara pengeluaran pada empat OPD, pertanggungjawab perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan di 21 OPD, serta adanya penyimpangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian internal.

Dalam pengimplementasi manajemen yang efektif di Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu sistem akuntansi pemerintahan, peran APIP pengimplementasi manajemen atau tata kelola yang benar sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi pemerintahan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK05/2011 dijelaskan bahwasanya sistem akuntansi pemerintah merupakan kumpulan prosedur penyelenggaraan, alat dan komponen lainnya yang digunakan untuk melaksanakan fungsi akuntansi diorganisasi pemerintah, Pelaporan keuangan sampai analisis transaksi.

keberhasilan pemerintah juga dapat dijabarkan dalam bentuk pengukuran yang melibatkan Fungsi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang adalah inspektorat daerah yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mendukung kepala daerah dalam mempromosikan dan memantau pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh daerah.

Penelitian Mailoor et al. (2017) menyatakan sistem akuntansi pemerintah, fungsi aparatnya, dan peran APIP, Budaya organisasi memiliki dampak negatif dan dapat diabaikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan. (Purnama Sari et al., 2023) Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas aparatur pemerintah daerah berdampak pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengelola keuangandaerah berdampak pada bagaimana pegawai Kabupaten Koto Xi Tarusan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun penyebab dilakukan penelitian ini pertama karena banyak temuan audit pada OPD Kota Palembang tahun 2022. Kedua, teknik pengambilan sampel *purposive sampling* digunakan dengan temuan penelitian, yang terdiri dari kepala kantor kepala kantor di OPD, kepala sub bagian keuangan, staff keuangan, kepala sub bagian perencanaan dan program. Ketiga atau terakhir variabel dampak sistem pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi, fungsi APIP, kinerja aparatur pemerintah daerah, dan sistem akuntansi

pemerintah pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. TELAHAH LITERATUR

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori akuntansi yang berkembang secara paralel dengan akuntansi dan kemudian diperluas dari aliran pemikiran akuntansi manajemen ke disiplin akademis lainnya (Herni Syahara et al, 2024). Teori *stewardship* ini berasumsi bahwa terdapat Korelasi yang kuat antara kinerja perusahaan dan keberhasilan organisasi untuk memaksimalkan fungsi utilitas. Teori ini mengandung arti bahwa masyarakat sebagai pelanggan harus memantau langsung pemerintah sebagai pengelola. Masyarakat juga memerlukan informasi untuk memantau tata kelola pemerintahan, sejalan dengan tujuan yang ada saat ini, yaitu mengoptimalkan kinerja pemerintah. terdapat hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan. Sukses mengacu pada memaksimalkan kepentingan klien dan kelompok manajemen. Filosofi teori penatalayanan didasarkan pada sifat manusia kemampuan bertindak jujur, dapat dipercaya, dan memiliki integritas terhadap orang lain. Pada penerapan *good governance* dan teori *stewardship* memiliki kaitan erat dalam konteks pengelolaan organisasi atau lembaga secara efektif dan bertanggung jawab. Teori *stewardship* menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki visi jangka panjang, berorientasi pada kepentingan bersama, dan bertindak sebagai pengawas yang mengawasi aset perusahaan. Prinsip tata kelola yang baik meliputi akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan keadilan, dapat memperkuat peran pemimpin sebagai pengurus yang bertanggung jawab dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Langkah-langkah sistem akuntansi yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang akan dibutuhkan oleh banyaknya pihak yang terlibat dalam dan di luar perusahaan. Namun, sistem akuntansi pemerintahan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK05/2011, merupakan kumpulan prosedur penyelenggaraan, alat dan komponen lainnya yang digunakan untuk melaksanakan fungsi akuntansi diorganisasi pemerintah, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan. Adapun sistem akuntansi keuangan daerah terdiri

dari beberapa langkah yang dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan. dari pelaporan ini adalah untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan dan memungkinkan pengguna laporan keuangan daerah untuk membuat keputusan. Sistem akuntansi pemerintahan adalah bagian penting dari pemerintahan yang efektif. Sistem akuntansi yang efektif dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas anggaran pemerintahan. (Sanjaya, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK05/2011 ketentuan pendoman umum tujuan dari sistem akuntansi pemerintah ialah untuk memberikan arahan agar pemerintah dapat sebagai berikut:

- a. penciptaan sistem akuntansi pemerintah yang menyarankan sistem berdasarkan akrual.
- b. pemanfaatan statistik keuangan pemerintah nasional dan statistik keuangan pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal.

2.3 Peran APIP

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Utama, Inspektorat Kementerian/LPND, Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, dan Inspektorat Pemerintah Provinsi. Tujuan APIP adalah memastikan bahwa kualitas tata kelola pemerintah yang baik telah berkembang dari semata-mata pengawas (*watchdog*) bekerja sebagai konsultan atau katalis. Sebagai pengawas internal, auditor memantau operasi dan mengidentifikasi kesalahan (Akhriani, 2024). Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bertugas mendukung kepala daerah dalam membudidayakan dan memantau pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh daerah dengan bantuan perangkat daerah. Peran APIP. berdasarkan Peraturan Sekretaris BPKP Nomor PER1326/K/LB/2009 pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Diantaranya, mencakup sub-elemen untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam elemen lingkungan pengendalian. merinci penerapan peran APIP yang efektif, sesuai Peraturan Sekretaris BPKP Nomor PER1326/K/LB/2009 dipemerintahan melakukan tugas auditor internal. Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus menggunakan teknik dan prosedur audit internal kontemporer yang difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi melalui tugas-tugas berikut untuk memenuhi peran APIP yang efektif:

- a. Memberikan kebenaran, keandalan, dan keamanan (*assurance*) yang cukup dengan melakukan tugas-tugas meliputi audit, review, penilaian, verifikasi, audit, dan monitoring.
- b. Terhadap penyelesaian berbagai permasalahan untuk mencapai tujuan organisasi melalui Sosialisasi, Arahan, Pembinaan, Konseling, dan Konsultasi, pelaksanaan pelatihan, dan pelaksanaan angket kami memberikan nasehat (konsultasi).

Dari Peraturan Sekretaris BPKP Nomor PER1326/K/LB/2009, dinyatakan dengan jelas bahwa pengakuan atas peran APIP yang bermanfaat pada hakikatnya terwujud melalui implementasi masukan dan/atau saran dari pemantauan mutu. Hal ini mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, manfaat dari peran APIP yang efektif jauh lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Kedua, APIP berperan penting dalam meningkatkan kemanjuran tata kelola, kontrol, dan prosedur manajemen risiko. Ketiga, penerapan standar yang baik oleh APIP memungkinkan lembaga pemerintah untuk mencapai tingkat efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan ekonomi yang lebih tinggi. melalui penerapan berbagai standar ini, APIP dapat memastikan bahwa proses pemeriksaan dan pengawasan internal dilakukan dengan cara yang dapat meningkatkan kualitas dan hasil kerja lembaga pemerintah. Akibatnya, APIP dapat dinilai efektif dalam menjalankan perannya, sehingga mampu memberikan kontribusi besar untuk pencapaian tujuan pemerintah yang baik.

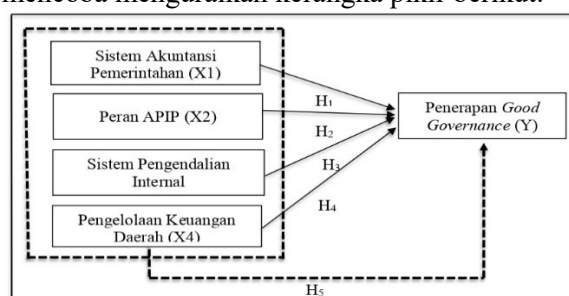
2.4 Penelitian Terdahulu

Pada studi empiris yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Mailoor et al. (2017) berjudul "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemda, Peran APIP, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik" Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun budaya organisasi memiliki dampak negatif dan dapat diabaikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem akuntansi pemerintah, efektivitas aparturnya, peran APIP, dan sistem pengendalian internal semuanya memiliki dampak positif dan signifikan.

Dampak kerja Aparatur Pemerintah daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Studi Kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan) merupakan studi tahun 2023 oleh (Purnama Sari et al., 2023) . Berdasarkan temuan penelitian, dapat dilihat bahwa pengelola keuangan daerah berdampak pada seberapa baik pegawai Kabupaten Koto Xi Tarusan diimplementasikan dengan tata kelola yang baik, begitu pula efektivitas aparat pemerintah daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis mencoba menguraikan kerangka pikir berikut:



Gambar .1 Kerangka Pemikir

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Penerapan Good Governance (PGG)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK05/2011 ketentuan pendoman umum dalam rangka menyiapkan sistem akuntansi pemerintah yang menyarankan sistem berbasis akrual dan untuk menerapkan statistik keuangan pemerintah untuk persiapan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional, sistem akuntansi pemerintah berupaya menawarkan pedoman bagi pemerintah. Adapun Sistem akuntansi pemerintah memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menurut studi empiris (Mailoor et al. 2017), Dampak Sistem Akuntansi Pemerintah, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengimplementasian Tata Kelola yang Baik (Studi Empiris di Kabupaten Kepulauan Talaud). Maka dari itu penulis mengajukan hipotesis berikut :

H₁ : Sistem akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif terhadap penerapan *good governance* (PGG)

2.6.2 Pengaruh Peran APIP terhadap Penerapan *good governance* (PGG)

Peran APIP yang dapat dicapai dengan dukungan dari auditor yang berpengalaman dan profesional dengan hasil audit internal yang semakin baik. Di setiap institusi pemerintah, dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. APIP adalah Dalam rangka mendukung dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh daerah dan didukung oleh perangkat daerah, inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Mailoor et al. (2017) APIP memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menurut sebuah studi berjudul Dampak Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Penerapan Tata Kelola yang Baik (Studi Lapangan di Kabupaten Kepulauan Talaud). Maka dari itu penulis mengajukan hipotesis berikut :

H₂ : Peran APIP berpengaruh secara positif terhadap penerapan *good governance* (PGG)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode statistik untuk mengolah data dan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi dan sampel. Metode ini dipilih untuk mengetahui berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi penerapan *good governance* pada OPD Kota Palembang.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pada OPD Kota Palembang. Study ini dimulai dari bulan februari 2024 sampai dengan bulan juli 2024.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2022: 38) “Variabel penelitian adalah sesuatu yang dipilih oleh peneliti untuk dipahami, mengumpulkan

informasi dan membuat kesimpulan”. Penelitian ini pakai dua jenis variabel, yaitu variabel independen yaitu Sistem akuntansi pemerintahan, Peran APIP dan variabel dependen penerapan *good governance* (PGG)

3.4 Definisi Operasional

1. Sistem akuntansi pemerintahan dalam penelitian ini mengacu dalam rangka menyiapkan sistem akuntansi pemerintah yang menyarankan sistem berbasis akrual dan untuk menerapkan statistik keuangan pemerintah secara nasional dan untuk persiapan konsolidasi fiskal, sistem akuntansi pemerintah berupaya menawarkan pedoman bagi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah berkontribusi pada penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif.
2. Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam penelitian ini mengacu pada pencapaian dengan dukungan pada auditor yang berpengalaman dan profesional dengan hasil audit internal yang semakin baik. Di setiap institusi pemerintah, dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. APIP adalah Dalam rangka mendukung dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh daerah dan didukung oleh perangkat daerah, inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
3. Penerapan *good governance* penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Dengan menerapkan metode prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan pemerintahan menjadi lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Palembang Tahun 2024. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu atau dengan pertimbangan tertentu.

1. Tugas kepala kantor sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,

- inspektorat daerah, dan dinas atau badan adalah memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah
2. Kepala subbagian keuangan, yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana dan program keuangan
 3. Staf keuangan, karena mereka bertanggung jawab untuk menjalankan program pengelolaan keuangan.
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Karena dia bertanggung jawab untuk membuat rencana program kegiatan.

Masing-masing sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, inspektorat daerah, dinas dan badan diberikan 4 kuesioner yang akan diisi oleh pihak-pihak yang telah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, total sampel 128.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini memanfaatkan sumber data primer yang dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden terkait di OPD Palembang, Indonesia.

3.7 Teknik Analisis Data

Program SPSS versi 29 digunakan untuk membantu metode analisis data dalam penelitian ini. Statistik deskriptif, uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis adalah metode analisis data yang pakai.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Hasil Penelitian

4.1.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	120	31	46	39.36	2.810
PP	120	33	48	38.39	2.591
PGG	120	35	49	41.52	2.786
Valid N (listwise)	120				

Sumber : Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwasanya, dari 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sampel, dalam 1 kantor OPD terdiri 4 responden dengan sampel kembali

sebanyak 30 OPD dengan responden studi ini mencakup hingga 120 peserta. Nilai N, uji total setiap sampel, nilai minimal setiap sampel yang diuji, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap sampel independen atau sampel dependen yang diuji berasal dari hasil uji deskriptif.

Tabel di atas menggambarkan bahwa nilai terendah, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk variabel independen Sistem Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata besaran, dan standar deviasi besar ditemukan untuk variabel independen untuk peran APIP. Mengenai variabel dependen, ketika tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan, diperoleh nilai terendah, diikuti oleh nilai terbesar, nilai rata-rata terbesar (rata-rata), dan standar deviasi terbesar.

4.1.1.2 Hasil Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Residual
N			120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.000000
	Std. Deviation		2.62194663
Most Extreme Differences	Absolute		.071
	Positive		.071
	Negative		-.036
Test Statistic			.071
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.136
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.127
		Upper Bound	.145

Sumber : Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai sisa telah dinormalisasi. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menggunakan model regresi untuk memprediksi peran tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan masukan variabel independennya yang terdiri dari sistem akuntansi pemerintahan dan peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil dari pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	24.289	4.434			5.478	<.001		
SAP	.200	.089	.201	.241	.027		.939	1.065
PP	.244	.097	.227	.2528	.013		.939	1.065

a. Dependent Variable: Penerapan *Good Governance* (Y)

Sumber : Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Nilai toleransi untuk variabel pendapatan asli daerah adalah 0,939 dan nilai VIF adalah 1,065 berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel 3, yang dijelaskan dalam hasil keluaran tabel koefisien. Nilai toleransi untuk variabel belanja modal adalah 0,929 dan nilai VIF adalah 1,065.

Dari hasil yang didapatkan pada dalam uji multikolinieritas sistem akuntansi pemerintahan, Karena varian faktor inflamasi (VIF) ≤ 10 dan peran APIP mengasumsikan nilai toleransi lebih dari 0,10 (10%), multikolinearitas tidak ada dalam pengujian ini. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel bebas kurang dari 95%. Oleh karena itu, pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik oleh OPD Kota Palembang dapat diprediksi dengan menggunakan ketiga variabel tersebut.

4.1.2.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-2.614	2.693		-970	.334
	SAP	.091	.054	.157	1.675	.097
	PP	.029	.059	.046	.490	.625

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber : Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai absolut sisa (ABS_RES), variabel dependen, tidak secara statistik dipengaruhi secara signifikan oleh satu variabel independen. Kemungkinan signifikansinya di atas tingkat kepercayaan nilai 0,05 menunjukkan hal ini. Ditentukan bahwasanya model regresi tidak memiliki problem heteroskedastisitas.

4.1.3 Persamaan Regresi

Hasil dari persamaan regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut ini :

Tabel 5
Hasil Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	24.289	4.434		5.478	<.001
	SAP	.200	.089	.201	2.241	.027
	PP	.244	.097	.227	2.528	.013

a. Dependent Variable: Penerapan Good Governance (Y)

Sumber : Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Persamaan regresi linier berganda antara sistem akuntansi pemerintah dan fungsi APIP dinyatakan sebagai berikut, berdasarkan hasil pada tabel 5 di atas:

$$PGG = \alpha + \beta_1 SAP + \beta_2 PP + e$$

Keterangan:

PGG : Penerapan *good governance*
 SAP : Sistem Akuntansi Pemerintahan
 PP : Peran APIP
 α : konstanta
 β : koefisien regresi
 e : error

Persamaan regresi linear berganda yang dapat dibuat berdasarkan tabel 5 adalah :

$$Y = 24,289 - 0,027 X_1 + 0,013 X_2 + e$$

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Koefisien Determinasi

Sejauh mana model dapat menjelaskan macam variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R²). Koefisien penentuan mempunyai nilai 0 dan 1. Nilai R² yang rendah menyatakan bahwa kapasitas variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat sedikit. Sebaliknya, jika nilai R² dekat 1, ini menyatakan bahwa hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memrencanakan macam variabel dependen diberikan oleh variabel independen. Berikut ini adalah hasil perhitungan determinasi (R²):

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.339 ^a	.115	.099	2.644

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Pemerintahan (X1), Peran APIP (X2)

Sumber : Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R Square) memiliki nilai 0,115. Hal ini menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah dan peran APIP berdampak pada 11,5% variabel penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara berbagai faktor mempengaruhi sisanya 88,5%.

4.1.4.2 Uji Statistik F

Tujuan dari Uji Statistik F ini adalah untuk menentukan kelayakan atau ketidakviabilitas model regresi yang digunakan. Model penelitian dapat digunakan atau model layak jika perhitungan F lebih besar dari F

tabel atau probabilitasnya kurang dari tingkat signifikansi ($Sig < 0,05$). Model berikut adalah hasil tabel uji dari model regresi antara variabel yang akan diperkirakan dan variabel bebas jika F yang dihitung kurang dari tabel F atau jika probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi ($Sig > 0,05$).

Tabel 7
Hasil Uji Statistik f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	105.889	2	52.944	7.572	<.001 ^b
	Residual	818.078	117	6.992		
	Total	923.967	119			

a. Dependent Variable: Penerapan *Good Governance* (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Pemerintahan (X1), Peran APIP (X2)

Sumber : Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F 7,572 dan nilai signifikansi 0,000 dihasilkan oleh model regresi yang digunakan. Temuan uji hipotesis menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak. Sesuai dengan standar pengambilan keputusan ini. Seperti yang diamati, $Sig\ 0.000 < \alpha = 0.05$. Akibatnya, sistem akuntansi pemerintah dan peran gabungan APIP memiliki dampak yang menguntungkan dan patut dicatat pada penerapan tata kelola yang baik, dan model regresi studi dianggap layak.

4.1.4.3 Uji Statistik T

Korelasi antara variabel independen dan variabel dependen diperiksa menggunakan uji t statistik. Tabel keluaran di bawah ini memberikan penjelasan tentang hasil uji-t.

Tabel 8
Hasil Uji Statistik t

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	24.289	4.434		5.478	<.001
	SAP	.200	.089	.201	2.241	.027
	PP	.244	.097	.227	2.528	.013

a. Dependent Variable: Penerapan *Good Governance* (Y)

Sumber : Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Tabel 8 digunakan untuk menghitung sistem akuntansi, menghasilkan hasil 0,027 dan tingkat signifikansi 0,05. Pada variabel peran APIP memiliki nilai signifikansi ($0,013 > 0,05$) lebih tinggi dari alfa. Sistem akuntansi pemerintah adalah hasil uji-t, dan peran APIP berdampak besar pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sistem Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penerapan *Good Governance* (PGG)

Variabel sistem akuntansi pemerintah memiliki tingkat signifikansi 0,027 ($0,027 > 0,05$), yang lebih tinggi dari alfa (0,05). Maka dari itu, bahwa unsur-unsur sistem akuntansi publik secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. mendukung temuan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Mailoor et al. (2017), yang mengklaim bahwa adopsi tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem akuntansi pemerintah terkait.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Ini menyatakan bahwa semakin baik sistem akuntansi pemerintah diterapkan, semakin baik sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, instansi, dan instansi pemerintah Kota Palembang melakukan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Dapat diketahui bahwasanya sistem akuntansi pemerintahan yang baik dapat menjadi fondasi bagi penerapan *good governance* di OPD Kota Palembang, didalam Sistem Akuntansi Pemerintahan membantu pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Dengan memberikan laporan keuangan yang transparan, pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai entitas yang dapat diandalkan yang bertindak demi kepentingan publik dan memungkinkan implementasi prinsip tata kelola yang baik untuk kemajuan ekonomi lokal, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2 Peran APIP Terhadap Penerapan *Good Governance* (PGG)

Variabel Peran APIP memiliki tingkat signifikansi 0,013 ($0,013 > 0,05$), yang lebih tinggi dari alfa (0,05). Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel peran APIP secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi penerapan tata kelola yang baik. Studi ini mendukung penelitian Mailoor et al. (2017) yang menemukan bahwa peran APIP secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi penerapan tata kelola yang baik.

Temuan studi ini menunjukkan bagaimana peran APIP dapat sangat membantu dalam adopsi

tata kelola pemerintahan yang baik oleh OPD Kota Palembang. Penerapan prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, serta kesetaraan dan kesetaraan, dalam OPD dapat dijamin oleh APIP melalui pengawasan yang efisien. Maka dari itu pimpinan OPD harus memastikan bahwa APIP memiliki kapasitas dan independensi yang cukup untuk melaksanakan perannya secara efektif. Selain itu, OPD juga harus memastikan. Adapun peran APIP dalam memberikan rekomendasi perbaikan dapat mendorong perbaikan kinerja OPD dan meningkatkan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan menyampaikan laporan hasil pengawasan APIP secara terbuka. APIP dapat membantu OPD dalam meningkatkan pengendalian internal dan tata kelola yang baik melalui fungsi konsultasi dan bantuan. Keberadaan APIP yang profesional dan independen juga dapat mendorong lingkungan pengendalian yang baik untuk penerapan tata kelola yang baik.

5. SIMPULAN

Sistem akuntansi pemerintahan dan peran APIP terbukti memiliki dampak dan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik OPD Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan membantu pemerintahan daerah menjalankan pemerintahan yang baik. Pelaporan keuangan yang bertanggung jawab dapat membantu pemerintah daerah memantapkan diri sebagai entitas andal yang bertindak untuk kepentingan publik. Adapun peran APIP memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintah daerah dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, variabel-variabel tersebut juga memiliki dampak besar sekaligus menguntungkan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik OPD Kota Palembang.

Keterbatasan Metode kuesioner adalah satu-satunya yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Disarankan juga agar peneliti menggunakan wawancara langsung sebagai metode pengumpulan data tambahan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain selain variabel independen lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good governance* (PGG) dan dapat memanfaatkan struktur perangkat daerah dengan lebih besar.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akhriani, R. (2024). Independensi Dalam Persepektif Apip Pemerintah Daerah : Studi Fenomenologi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 29(2), 214–223. <https://doi.org/10.23960/jak.v29i2.3405>
- Dewi Selviani Yulientinah, S. N. A. S. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Good Governance di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. *Logistics And Accounting Development Journal* .
- Herni Syahara, S. S. F. T. J. A. W. dan S. A. (2024). Implementasi Dan Peran Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi: Studi Literatur. *Karimah Tauhid*.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023).
- Jefri herbert mailoor, jullie j. S. , hendrik gamaliel. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance(Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talud). *Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8–2.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per-1326/K/Lb/2009 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (2011).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pub. L. No. 25.

Purnama Sari, R., Haryati, R., Lady Silvera, D., Author, C., Kunci, K., Aparatur Pemerintah Daerah, K., Keuangan Daerah, P., & Good Governance, P. (2023). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan)*. 1(2). <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2>

Sanjaya, I. K. , & S. I. W. (2023). Dampak Sistem Akuntansi Terhadap Good Governance Disektor Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , 15(2), 123–135.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.